

TESIS

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 1
TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH DALAM PEMUNGUTAN PAJAK ALAT
BERAT DI KABUPATEN BARITO KUALA**



Diajukan Oleh

Tiya Safitri

NIM. 2420215320049

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

JUNI 2026

**Judul Tesis : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM
PEMUNGUTAN PAJAK ALAT BERAT DI KABUPATEN
BARITO KUALA**

Nama : Tiya Safitri
NIM : 2420215320049

Disetujui, Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Dr. M. Ananta Firdaus, S.H., M.H

NIP. 198309032009121002

Diketahui,

Koordinator Program Studi Magister Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

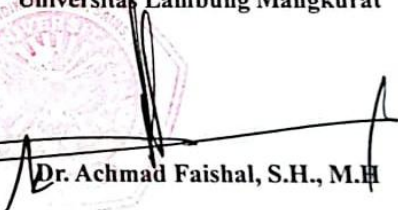


Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H

NIP. 197202081999031004

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H

NIP. 197506152003121001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda:

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tiya Safitri
Nim : 2420215320049
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya.

Banjarmasin, Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



Tiya Safitri

SAFITRI, TIYA. 2026. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM PEMUNGUTAN PAJAK ALAT BERAT DI KABUPATEN BARITO KUALA

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 terkait pemungutan pajak alat berat di wilayah Kabupaten Barito Kuala. Fokus utama penelitian terletak pada evaluasi terhadap klausul regulasi yang mengatur kepatuhan pelaporan pajak alat berat oleh perusahaan serta dampaknya terhadap optimalisasi pendapatan asli daerah.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun realisasi penerimaan pajak pada tahun 2025 menunjukkan tren positif, implementasi di lapangan masih terkendala oleh adanya kekosongan norma (*vacuum of law*) terkait sanksi administratif yang tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan atau memberikan data alat berat dengan tidak jujur. Ketiadaan sanksi ini mengakibatkan petugas di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Marabahan mengalami keterbatasan dalam melakukan penegakan hukum, sehingga proses pemungutan cenderung bersifat persuasif dan sangat bergantung pada itikad baik wajib pajak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas regulasi saat ini belum optimal dalam menjamin transparansi data dan akuntabilitas pemungutan pajak alat berat. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan perlunya penyusunan peraturan pelaksana yang lebih spesifik, seperti Peraturan Bupati atau Peraturan Kepala Daerah, yang mengatur sanksi administratif bagi pelanggaran pelaporan alat berat. Langkah ini dipandang krusial untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi petugas, mendorong transparansi korporasi, serta menjamin keberlanjutan sistem perpajakan daerah yang lebih akuntabel.

SAFITRI, TIYA. 2026. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM PEMUNGUTAN PAJAK ALAT BERAT DI KABUPATEN BARITO KUALA

ABSTRAK

Kata Kunci : Pajak Alat Berat, Implementasi Peraturan Daerah, Penegakan Hukum, Sanksi Administratif, Transparansi Wajib Pajak.

Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, khususnya terkait pemungutan pajak alat berat di Kabupaten Barito Kuala. Meskipun realisasi penerimaan pajak alat berat pada tahun 2025 telah mencapai target, efektivitas pemungutan di lapangan masih menghadapi kendala yuridis dan operasional yang signifikan. Masalah utama yang diidentifikasi adalah adanya kekosongan norma (*vacuum of law*) dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, di mana tidak terdapat klausul sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak melaporkan atau tidak jujur dalam memberikan data alat berat. Akibatnya, petugas lapangan di UPPD Marabahan tidak memiliki daya paksa (*coercive power*) saat menghadapi wajib pajak yang tidak kooperatif. Proses pendataan saat ini masih bersifat persuasif dan sangat bergantung pada itikad baik wajib pajak, yang berpotensi menyebabkan ketidakakuratan data objek pajak dan hilangnya potensi pendapatan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan sanksi administratif menciptakan hambatan struktural bagi aparat dalam menegakkan kepatuhan. Kesimpulan dari tesis ini adalah bahwa capaian target pajak saat ini belum mencerminkan optimalisasi potensi pajak yang sebenarnya. Disarankan agar Pemerintah Daerah segera menyusun peraturan pelaksana (seperti Peraturan Bupati/Perkada) yang secara spesifik mengatur sanksi administratif bagi pelanggaran pelaporan alat berat. Langkah ini diperlukan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi petugas, menjamin transparansi data perusahaan, serta menciptakan sistem perpajakan daerah yang akuntabel dan berkelanjutan.

SAFITRI, TIYA. 2026. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM PEMUNGUTAN PAJAK ALAT BERAT DI KABUPATEN BARITO KUALA

ABSTRACT

Keywords: Heavy Equipment Tax, Implementation of Regional Regulation, Law Enforcement, Administrative Sanctions, Taxpayer Transparency.

This study analyzes the implementation of South Kalimantan Provincial Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Retributions, specifically regarding the collection of heavy equipment tax in the Barito Kuala Regency. Although the realization of heavy equipment tax revenue in 2025 reached its target, the effectiveness of field collection still faces significant juridical and operational obstacles. The primary issue identified is a vacuum of law within Regional Regulation Number 1 of 2024, as it lacks explicit sanction clauses for companies that fail to report or provide dishonest data regarding their heavy equipment. Consequently, field officers at the Marabahan Revenue Service Unit (UPPD) lack coercive power when dealing with non-cooperative taxpayers. The current data collection process remains persuasive and relies heavily on the good faith of taxpayers, which potentially leads to inaccuracies in tax object data and the loss of regional revenue potential. This research employs a socio-legal (juridical-empirical) method with a qualitative approach. The results indicate that the absence of administrative sanctions creates structural barriers for officials in enforcing compliance. This thesis concludes that the current achievement of tax targets does not yet reflect the true optimization of tax potential. It is recommended that the Regional Government promptly formulate implementing regulations (such as Regent Regulations/Perkada) that specifically govern administrative sanctions for violations in heavy equipment reporting. This step is necessary to provide a strong legal basis for officers, ensure corporate data transparency, and establish an accountable and sustainable regional taxation system.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Pemungutan Pajak Alat Berat di Kabupaten Barito Kuala, tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulisan tesis ini merupakan perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan dan pembelajaran. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H selaku Ketua Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak Dr. Ananta Firdaus S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pemikiran berharga dalam mengarahkan penulis hingga tesis ini selesai dengan baik.
4. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H dan Ibu Dr. Hj. Erlina S.H., M.H selaku dosen penguji yang dengan kesabarannya memberikan arahan dalam penulisan tesis ini.
5. Seluruh jajaran staf pengajar dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu dan pelayanan selama masa studi penulis.
6. Keluarga tercinta, terutama orang tua, atas doa yang tak pernah putus serta dukungan moral dan material yang menjadi penguat bagi penulis di setiap langkah.
7. Rekan-rekan sejawat di UPPD Samsat Marabahan, terima kasih atas dukungan, inspirasi, dan kebersamaan yang telah diberikan selama masa penelitian ini berlangsung.
8. Untuk sahabat saya, Alya Zanina, Terima kasih atas setiap dukungan, ketulusan, dan doa yang tiada henti kamu berikan. Terima kasih telah menjadi pendengar yang begitu sabar, selalu hadir di setiap fase tersulit hingga momen termanis dalam hidup saya, serta menjadi pemberi semangat

dan motivasi nyata yang tak pernah lelah menemani seluruh perjalanan penyusunan tesis ini.

9. Kepada keluarga besar grup Rezeki Berkah Melimpah, terima kasih atas segala dukungan dan energi positif yang kalian curahkan. Kalian telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam perjalanan tesis ini, memberikan dorongan di saat lelah dan motivasi tiada henti agar saya terus berproses menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih karena telah menerima segala kekurangan saya dan dengan sabar membersamai setiap langkah saya hingga sampai di titik ini
10. Nita dan Monica atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang tiada henti selama penulis menyelesaikan tesis ini. Terima Kasih telah menjadi teman seperjuangan terbaik.
11. Teman-teman seperjuangan satu Angkatan Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat 2024.
12. Kepada seseorang yang pernah singgah dalam perjalanan tesis ini, Terima Kasih atas semangat dan ide judul tesis yang diberikan dan kemudian tumbuh menjadi karya ini. Terima Kasih telah menjadi bagian cerita.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan. Akhir kata, semoga karya tulis ini dapat memberikan kontribusi positif, khususnya bagi pengembangan ilmu hukum di bidang perpajakan, serta bermanfaat bagi masyarakat luas.

Banjarmasin, Juni 2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
RINGKASAN.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	14
1. Tujuan Penelitian	14
2. Kegunaan Penelitian	15
E. Tinjauan Pustaka.....	16
1. Landasan Teori.....	16
F. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Sifat Penelitian.....	22
3. Jenis dan Bahan Hukum	22
4. Lokasi Penelitian	23
5. Jenis dan Sumber Data	23
6. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	24
7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	25
G. Sistematika Penulisan	26
BAB II IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1	
TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI	
DAERAH DALAM PEMUNGUTAN PAJAK ALAT BERAT	
DI KABUPATEN BARITO KUALA	28

A. Gambaran Umum Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.....	28
1. Latar Belakang Pembentukan Perda Nomor 1 Tahun 2024.....	31
2. Landasan Filosofis Peraturan Daerah	34
3. Kedudukan Perda Nomor 1 Tahun 2024 dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan	38
4. Kewenangan UPPD dalam Pemungutan Pajak Alat Berat di Kabupaten Barito Kuala	42
B. Gambaran Umum Kabupaten Barito Kuala.....	45
1. Profil Kabupaten Barito Kuala	45
2. Kondisi Geografis Kabupaten Barito Kuala	46
3. Kondisi Ekonomi Kabupaten Barito Kuala	48
4. Potensi Pajak Alat Berat di Kabupaten Barito Kuala	50
5. Kedudukan dan Tugas UPPD Marabahan	55
6. Tantangan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 dalam Pemungutan Pajak Alat Berat	56
7. Tinjauan Umum tentang Pajak Alat Berat	62
8. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 23A;.....	64
9. Implementasi Kebijakan dan Penegakan Hukum.....	66
10. Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto	68
11. Implementasi Peraturan Daerah.....	69
BAB III FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 DALAM OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH DARI SEKTOR PAJAK ALAT BERAT DI KABUPATEN BARITO KUALA	70
A. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Implementasi	70
1. Faktor Hukum.....	70
2. Faktor Aparatur atau Penegak Hukum.....	71
3. Faktor Sarana dan Prasarana.....	72

4. Faktor Masyarakat atau Wajib Pajak	72
5. Faktor Budaya Hukum.....	74
6. Data Target dan Realisasi Pajak.....	75
7. Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Alat Berat di Kabupaten Barito Kuala	76
B. Analisis Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 dalam Optimalisasi Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Alat Berat di Kabupaten Barito Kuala.....	77
C. Implikasi Faktor-Faktor Implementasi terhadap Optimalisasi Pendapatan Daerah	81
1. Implikasi Faktor Hukum.....	81
2. Implikasi Faktor Aparatur.....	82
3. Implikasi Faktor Sarana dan Fasilitas.....	82
4. Implikasi Faktor Masyarakat.....	82
5. Implikasi Faktor Budaya Hukum	83
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	84
A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 dalam Pemungutan Pajak Alat Berat di Kabupaten Barito Kuala	84
B. Analisis Berdasarkan Teori George C. Edwards III	85
1. Faktor Komunikasi	85
2. Faktor Sumber Daya.....	86
3. Faktor Sikap Pelaksana.....	86
4. Faktor Struktur Birokrasi.....	87
C. Analisis Berdasarkan Teori George C. Edwards III	87
D. Mekanisme Perhitungan Pajak Alat Berat di Kabupaten Barito Kuala.....	88
E. Analisis Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	90
1. Faktor Hukum.....	90
2. Faktor Sarana dan Fasilitas.....	90
3. Faktor Masyarakat atau Perusahaan Wajib Pajak	91

4. Faktor Budaya Hukum.....	92
F. Kendala Petugas dalam Melakukan Pendataan Alat Berat.....	92
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	101